PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa a berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.40 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.37 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009 ,UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.25 Tahun 2011, PP No.61 Tahun 2010, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.95 Tahun 2018, PERMENKOMINFO No.20 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.70 Tahun 2019, PERMENPANRB No.26 Tahun 2020, PERKA Lembaga Sandi Negara No. 14 Tahun 2010, PERKA Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2017, PERKA BSSN No. 10 Tahun 2019, PERKA BSSN No. 8 Tahun 2020,PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA JABAR No.4 Tahun 2021, PERDA KAB.BOGOR No.8 Tahun 20109,PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERBUP No.63 Tahun 2020, PERBUP No.93 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui: penyusunan kebijakan pengamanan informasi; pengelolaan sumber daya keamanan informasi; pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; penyediaan layanan keamanan informasi. Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi dilakukan dengan: menyusun rencana strategis pengamanan informasi; menetapkan arsitektur keamanan informasi; menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi. Keamanan data dan informasi sebagaimana dilaksanakan melalui perlindungan informasi berklasifikasi, mencakup: perlindungan fisik, dilakukan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sarana fisik komunikasi serta segala kegiatan yang berlangsung di dalamnya dari ancaman dan gangguan seperti pencurian, perusakan, dan radiasi gelombang elektromagnetik; b. perlindungan administrasi, dilakukan untuk mencegah kelalaian dan tindakan indisipliner; dan c. perlindungan logik. Perlindungan fisik dilakukan melalui: kendali akses ruang; pemasangan teralis; penggunaan kunci ganda; pemasangan CCTV; dan/atau penggunaan ruang Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating Spurious Transmission (TEMPEST). Perlindungan administrasi dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang menerangkan kebijakan, standar, dan prosedur operasional dalam pengamanan informasi berklasifikasi. Perlindungan logik dilakukan dengan menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan kenirsangkalan. Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dari BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 6 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2021.
- Penjelasan: 32 hlm.